

# RANKHIR RENJA

2026



**Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (DPRD)  
Kota Probolinggo**

---

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Taufik dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang telah disusun mengacu pada arah kebijakan dan target program prioritas RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Rencana Kerja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD disetiap tahunnya dan dilaporkan di akhir pelaksanaan anggaran dalam Laporan Kinerja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026 berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pagu indikatifnya dan target indikator kinerja ditahun 2026 sesuai dengan hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Bab I      Pendahuluan .....	3
1.1    Latar Belakang .....	3
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4    Sistematika Penulisan .....	5
Bab II     Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....	7
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	13
2.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	14
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	21
Bab III    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	22
3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	22
3.2    Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	22
Bab IV     Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	27
4.1    Program dan Kegiatan .....	27
Bab V     Penutup .....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sekretariat DPRD Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Probolinggo. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Probolinggo diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2026. Perumusan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk tahun 2026 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2026. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 yang selanjutnya.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo;

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026;
17. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
18. Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor : 700.1.1.3/18/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2025 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026

### **1.3. MAKSUD & TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Probolinggo untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025–2026

#### **1.3.2. Tujuan**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

### **Bab V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA**  
**PROBOLINGGO TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN**  
**CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat mengacu pada Renstra Perubahan yang telah disusun dan banyak mengalami perubahan menyesuaikan dengan regulasi terbaru yang memang dinamis. Hal ini juga tidak terlepas dengan dinamika politik nasional. Adapun kendala pelaksanaan Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Probolinggo menyesuaikan dengan aturan yang berlaku terkait perubahan penatausahaan yang sempat mengalami beberapa perubahan dimana adanya persepsi yang berbeda pada tiap daerah sehingga menimbulkan multi tafsir baik antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta bagian perbendaharaan dalam hal pelaksanaan dan pemenuhan Surat Pertanggung Jawaban agar sesuai dengan regulasi baik pusat maupun yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2024 Tabel 2.1 dimaksud sebagaimana terlampir.

TABEL TC 29

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

Kota Probolinggo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom 5+7+9)	11=(kolom 10/9 x100)
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	6	6	100	6	6	100
4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	39	39	39	100	39	39	100
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan	12	12	12	12	100	12	12	100
4.02.01.2.03.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	100	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>
4.02.01.2.03.06	Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3	3	3	100	3	3	100
4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	5	5	5	100	5	5	100

4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20	20	20	100	20	20	100
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	10	10	100	10	10	100
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	15	15	15	100	15	15	100
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10	10	10	100	10	10	100
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	5	5	100	5	5	100
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	100	12	12	100
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	30	30	100	30	30	100
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	3	3	3	100	3	3	100
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah realisasi Meubel	15	15	15	15	100	15	15	100
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71	71	71	71	100	71	71	100
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18	18	18	18	100	18	18	100
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	133.3333333
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpenuhi</b>	100	100	100	100	100	100	300	300
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	3	3	100	3	3	33.33333333
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	18	18	18	100	18	18	200
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase mebel yang terpelihara	4	4	4	4	100	4	4	100
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	123	123	123	100	123	123	100

4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	12	12	100	12	12	100
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	30	30	30	100	30	30	100
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120	120	120	120	100	120	120	100
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	30	30	30	100	30	30	100
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	12	12	12	100	12	12	100
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	12	12	12	100	12	12	100
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	74	100	74	85.07	107.9568528	78.8	78.8	107
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terlaksana</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	8	8	8	100	8	8	100
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	1	1	100	1	1	100
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15	15	15	15	100	15	15	100

4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15	15	15	15	100	15	15	100
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	15	15	15	100	15	15	100
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15	15	15	15	100	15	15	100
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15	15	15	15	100	15	15	100
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.02.02.2.04.01	<b>Orientasi DPRD</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	30	30	30	30	100	30	30	100
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	90	90	90	90	100	90	90	100
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	7	7	7	100	7	7	100
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	12	12	12	100	12	12	100
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1	1	0	0	1	1	100
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	40	40	40	40	100	40	40	100
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Aspirasi Masyarakat yg Diakomodir</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30	30	30	30	100	30	30	100
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60	60	60	60	100	60	60	100
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	1	1	100	1	1	100
<b>4.02.02.2.07</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Kerja Sama Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	450	450	450	450	100	450	450	100
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	12	12	12	100	12	12	100

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2024 tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran:

1. Indeks kepuasan Masyarakat atas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD pada tahun 2024 dengan target skor 74 tercapai skor 85,07

TABEL TC 30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI (IKU PD)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAT ANALISA
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	74	86	86,10	86,20	85,07	-	85,10	85,15	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base line 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	85,07	86	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	
		Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi	Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	72,62 (BB)	73,02 (BB)	73,41 (BB)	73,81 (BB)	74,21 (BB)	74,61 (BB)	75,00 (BB)	

## 2.3 PERANGKAT DAERAH

### 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia ( SDM ) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

- b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo adalah memfasilitasi / mendukung tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana yang telah di tetapkan.

- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan regulasi yang terbaru.

### **2.3.2 Tantangan dan Peluang**

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

#### **a. Tantangan**

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

#### **b. Peluang**

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

### **2.3.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 sebagai berikut:

#### **a. Rekomendasi**

Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sekretariat DPRD Kota Probolinggo. Peningkatan tersebut diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Probolinggo untuk mencapai tujuan DPRD Kota Probolinggo.

#### **b. Kebijakan Strategis**

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata

kelola;

2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.
10. Perlu adanya keterwakilan yang proporsional terkait kesetaraan gender sesuai dengan target nasional akan jumlah keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD yakni sebesar 30 persen.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

##### **2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**

Sekretariat DPRD didukung dengan 2 program, 17 kegiatan dan 69 sub kegiatan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 59.780.882.252,- Secara detil dapat dilihat pada tabel 2.3 pada lampiran Rencana Kerja ini.

Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2026 adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

###### **- Kegiatan :**

###### **a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**

###### **- Sub Kegiatan :**

- 1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - 1.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  - 1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
  - 1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
  - 1.5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- b. **Pembahasan Kebijakan Anggaran**
- Sub Kegiatan :
- 1.1. Pembahasan KUA dan PPAS
  - 1.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - 1.3. Pembahasan APBD
  - 1.4. Pembahasan APBD Perubahan
  - 1.5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c. **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**
- Sub Kegiatan :
- 1.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - 1.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
  - 1.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - 1.4. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK
  - 1.5. Pengawasan Penggunaan Anggaran
  - 1.6. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- d. **Peningkatan Kapasitas DPRD**
- Sub Kegiatan :
- 1.1. Pendalaman Tugas DPRD
  - 1.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  - 1.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  - 1.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
  - 1.5. Penyusunan Program Kerja DPRD
  - 1.6. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
- e. **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

- Sub Kegiatan :
  - 1.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
  - 1.2 Pelaksanaan Reses
- f. **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**
  - Sub Kegiatan :
    - 1.1. Penyusunan Kode Etik DPRD
    - 1.2. Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. **Fasilitasi Tugas DPRD**
  - Sub Kegiatan :
    - 1.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
    - 1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
    - 1.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- 2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - Sub Kegiatan :
      - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - Sub Kegiatan :
      - 1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - c. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
    - Sub Kegiatan :
      - 1.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    - Sub Kegiatan :
      - 1.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan :

1.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Sub Kegiatan :

1.1. Pengadaan Mebel

1.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan :

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan :

1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.3. Pemeliharaan Mebel

- 1.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

i. **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

- Sub Kegiatan :

- 1.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 1.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 1.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

j. **Layanan Administrasi DPRD**

- Sub Kegiatan

- 1.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- 1.2. Fasilitasi Fraksi DPRD
- 1.3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Tahun 2026					Tahun 2026	Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Usuran.....							
						Bidang Usuran.....			Rp 59.780.882.252			Rp 59.780.882.252	
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKM (Anggota DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	79	Rp 29.929.356.534	DAU	79	Rp 29.929.356.534	
4	02	02	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100	Rp 1.656.142.166		100	Rp 1.656.142.166	
4	02	02	2	01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	Rp 210.371.250		3	Rp 210.371.250	
4	02	02	2	01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5	Rp 1.046.420.916		5	Rp 1.046.420.916	
4	02	02	2	01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	Rp 81.000.000		3	Rp 81.000.000	
4	02	02	2	01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	Rp 293.350.000		3	Rp 293.350.000	
4	02	02	2	01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	Rp 25.000.000		1	Rp 25.000.000	
4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas	100	Rp 593.601.997		100	Rp 593.601.997	
4	02	02	2	02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Rp 181.785.917		1	Rp 181.785.917	
4	02	02	2	02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Rp 42.825.000		1	Rp 42.825.000	
4	02	02	2	02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Rp 197.037.080		1	Rp 197.037.080	
4	02	02	2	02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Rp 98.400.000		1	Rp 98.400.000	
4	02	02	2	02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Rp 73.554.000		1	Rp 73.554.000	
4	02	02	2	03		Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp 525.221.760		100	Rp 525.221.760	
4	02	02	2	03	0001	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	Rp 81.138.000		12	Rp 81.138.000	
4	02	02	2	03	0002	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	Rp 81.000.000		12	Rp 81.000.000	
4	02	02	2	03	0003	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	Rp 81.000.000		12	Rp 81.000.000	
4	02	02	2	03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Rp 54.714.000		1	Rp 54.714.000	
4	02	02	2	03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Rp 118.055.760		1	Rp 118.055.760	
4	02	02	2	03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Rp 109.314.000		1	Rp 109.314.000	
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100	Rp 633.041.111		100	Rp 633.041.111	
4	02	02	2	04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	180	Rp 24.741.111		180	Rp 24.741.111	
4	02	02	2	04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	Rp 100.000.000		3	Rp 100.000.000	
4	02	02	2	04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Rp 252.000.000		7	Rp 252.000.000	
4	02	02	2	04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	Rp 50.000.000		1	Rp 50.000.000	
4	02	02	2	04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	1	Rp 6.300.000		1	Rp 6.300.000	
4	02	02	2	04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	35	Rp 200.000.000		35	Rp 200.000.000	
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100	Rp 1.459.724.500		100	Rp 1.459.724.500	
4	02	02	2	05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30	Rp 34.350.000		30	Rp 34.350.000	

Kode						Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Tahun 2026	Tahun 2026	Lo ka si	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	02	02	2	05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		90	Rp	1.425.374.500		90	Rp	1.425.374.500
4	02	02	2	06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik sesuai ketentuan		100	Rp	7.625.000		100	Rp	7.625.000
4	02	02	2	06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1	Rp	6.500.000		1	Rp	6.500.000
4	02	02	2	06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		1	Rp	1.125.000		1	Rp	1.125.000
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang Difasilitasi		100	Rp	25.054.000.000		100	Rp	25.054.000.000
4	02	02	2	08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		400	Rp	25.000.000.000		400	Rp	25.000.000.000
4	02	02	2	08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12	Rp	18.900.000		12	Rp	18.900.000
4	02	02	2	08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		12	Rp	35.100.000		12	Rp	35.100.000
4	02	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>100</b>	<b>Rp</b>	<b>29.851.525.718</b>		<b>100</b>	<b>Rp</b>	<b>29.851.525.718</b>
4	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		100	Rp	247.000.000		100	Rp	247.000.000
4	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	Rp	97.000.000		5	Rp	97.000.000
4	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10	Rp	150.000.000		10	Rp	150.000.000
4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	Rp	4.923.658.624		100	Rp	4.923.658.624
4	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37	Rp	4.686.658.624		37	Rp	4.686.658.624
4	02	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Rp	7.000.000		1	Rp	7.000.000
4	02	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	Rp	230.000.000		12	Rp	230.000.000
4	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	Rp	50.000.000		100	Rp	50.000.000
4	02	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Rp	50.000.000		1	Rp	50.000.000
4	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	Rp	512.000.000		100	Rp	512.000.000
4	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		148	Rp	137.000.000		148	Rp	137.000.000
4	02	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		37	Rp	375.000.000		37	Rp	375.000.000
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	Rp	1.458.291.000		100	Rp	1.458.291.000
4	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	Rp	410.000.000		12	Rp	410.000.000
4	02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6	Rp	125.000.000		6	Rp	125.000.000
4	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	Rp	32.000.000		4	Rp	32.000.000
4	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	Rp	125.000.000		2	Rp	125.000.000
4	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1	Rp	10.000.000		1	Rp	10.000.000
4	02	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	Rp	80.025.000		12	Rp	80.025.000

Kode						Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
								Tahun 2026	Tahun 2026	Lo ka si	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	Rp	461.266.000			12	Rp	461.266.000
4	02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	Rp	55.000.000			1	Rp	55.000.000
4	02	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12	Rp	160.000.000			12	Rp	160.000.000
4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	Rp	1.200.000.000			100	Rp	1.200.000.000
4	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3	Rp	750.000.000			3	Rp	750.000.000
4	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		45	Rp	450.000.000			45	Rp	450.000.000
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi		100	Rp	2.121.448.000			100	Rp	2.121.448.000
4	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	Rp	75.000.000			12	Rp	75.000.000
4	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Rp	400.000.000			12	Rp	400.000.000
4	02	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	Rp	821.448.000			12	Rp	821.448.000
4	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Rp	825.000.000			12	Rp	825.000.000
4	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100	Rp	1.590.000.000			100	Rp	1.590.000.000
4	02	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4	Rp	175.000.000			4	Rp	175.000.000
4	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		19	Rp	425.000.000			19	Rp	425.000.000
4	02	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		4	Rp	50.000.000			4	Rp	50.000.000
4	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		37	Rp	365.000.000			37	Rp	365.000.000
4	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Rp	200.000.000			1	Rp	200.000.000
4	02	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		163	Rp	375.000.000			163	Rp	375.000.000
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi		100	Rp	17.535.528.094			100	Rp	17.535.528.094
4	02	01	2	15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		30	Rp	17.070.528.094			30	Rp	17.070.528.094
4	02	01	2	15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		90	Rp	375.000.000			90	Rp	375.000.000
4	02	01	2	15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		30	Rp	90.000.000			30	Rp	90.000.000
4	02	01	2	16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi		100	Rp	213.600.000			100	Rp	213.600.000
4	02	01	2	16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		30	Rp	3.600.000			30	Rp	3.600.000
4	02	01	2	16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		84	Rp	55.000.000			84	Rp	55.000.000
4	02	01	2	16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		12	Rp	155.000.000			12	Rp	155.000.000

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2026 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota**  
**Probolinggo**

**OPD : Sekretariat DPRD**

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<b>NIHIL</b>					

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Dari hasil telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam **Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo 2025 - 2026** mengenai *strategi dan arah kebijakan* pencapaian tujuan dan sasaran masing masing *misi* terkait dengan *tugas pokok dan fungsi* Sekretariat DPRD adalah :

##### a. Visi RPD Kota Probolinggo tahun 2025 – 2026:

**“Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo yang Inklusif Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**

Pada RPD 2025-2026 Sekretariat DPRD mengemban Amanah dari Misi ke 5 yaitu :

**“Tata Kelola pemerintahan yang kolaboratif dan dinamis serta pelayanan publik yang berkualitas sebagai Upaya optimalisasi reformasi birokrasi”**

##### b. Tema Pembangunan Tahun 2026 :

**“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Daerah melalui Penguatan Ekonomi Inklusif yang didukung Pemenuhan Infrastruktur”**

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO

#### 3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2026 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo untuk Tahun 2026 agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

#### 3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Probolinggo harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sesuai dengan ketugasan DPRD Kota Probolinggo.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Probolinggo dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan RPD 2025 – 2026 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPd dan Renja OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan:

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub**

Kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
  - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
  - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
  - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
  - 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
- i. Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan :
- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
  - 2) Fasilitasi Fraksi DPRD;
  - 3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
  - 4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

## **2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**

Kegiatan :

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan :
  - 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
  - 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan :
  - 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
  - 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
  - 3) Pembahasan APBD;
  - 4) Pembahasan APBD Perubahan;
  - 5) Pembahasan Laporan Semester;
  - 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan :
  - 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
  - 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
  - 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
  - 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
  - 7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan :
  - 1) Orientasi DPRD;

- 2) Pendalaman Tugas DPRD;
  - 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
  - 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
  - 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
  - 6) Penyusunan Program Kerja DPRD;
  - 7) Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
  - 2) Pelaksanaan Reses.
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
  - 2) Pengawasan Kode Etik DPRD.
- g. Pembahasan Kerja Sama Daerah Sub Kegiatan :
- 1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
  - 2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
- h. Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan :
- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
  - 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
  - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
  - 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2026**

#### **4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan**

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Meningkatnya Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagaimana terlampir.

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
	Tahun 2026					Tahun 2026	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Usuran.....								
						Bidang Usuran.....			Rp 52.567.356.712				Rp 59.843.882.252	
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100	Rp 27.148.616.037			79	Rp 29.929.356.534
4	02	02	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang difasilitasi		100	Rp 1.179.854.884			100	Rp 1.656.142.166
4	02	02	2	01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		3	Rp 95.776.500			3	Rp 210.371.250
4	02	02	2	01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		6	Rp 715.325.384			5	Rp 1.046.420.916
4	02	02	2	01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		3	Rp 72.740.000			3	Rp 81.000.000
4	02	02	2	01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		3	Rp 280.578.000			3	Rp 293.350.000
4	02	02	2	01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1	Rp 15.435.000			1	Rp 25.000.000
4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen kebijakan anggaran yang selesai dibahas tepat waktu		100	Rp 441.019.100			100	Rp 593.601.997
4	02	02	2	02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1	Rp 125.493.400			1	Rp 181.785.917
4	02	02	2	02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1	Rp 40.455.000			1	Rp 42.825.000
4	02	02	2	02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1	Rp 248.076.000			1	Rp 197.037.080
4	02	02	2	02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1	Rp 22.134.700			1	Rp 98.400.000
4	02	02	2	02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1	Rp 4.860.000			1	Rp 73.554.000
4	02	02	2	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah		100	Rp 280.356.000			100	Rp 525.221.760
4	02	02	2	03	0001	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		12	Rp 4.860.000			12	Rp 81.138.000
4	02	02	2	03	0002	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur		12	Rp 4.860.000			12	Rp 81.000.000
4	02	02	2	03	0003	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		12	Rp 4.860.000			12	Rp 81.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
	Tahun 2026					Tahun 2026	Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	02	2	03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1	Rp 4.860.000			1	Rp 54.714.000
4	02	02	2	03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		1	Rp 224.096.000			1	Rp 118.055.760
4	02	02	2	03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1	Rp 36.820.000			1	Rp 109.314.000
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi dan Pendalaman tugas		100	Rp 3.706.299.000			100	Rp 633.041.111
4	02	02	2	04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		120	Rp 3.130.580.000			180	Rp 24.741.111
4	02	02	2	04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		3	Rp 100.000.000			3	Rp 100.000.000
4	02	02	2	04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		6	Rp 216.000.000			7	Rp 252.000.000
4	02	02	2	04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		1	Rp 4.490.000			1	Rp 50.000.000
4	02	02	2	04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1	Rp 5.229.000			1	Rp 6.300.000
4	02	02	2	04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		100	Rp 250.000.000			35	Rp 200.000.000
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen Perencanaan		100	Rp 1.137.653.100			100	Rp 1.459.724.500
4	02	02	2	05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		30	Rp 31.520.000			30	Rp 34.350.000
4	02	02	2	05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		90	Rp 1.106.133.100			90	Rp 1.425.374.500
4	02	02	2	06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen/pedoman Kode Etik DPRD yang disusun dan ditetapkan		100	Rp 3.545.000			100	Rp 7.625.000
4	02	02	2	06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1	Rp 2.600.000			1	Rp 6.500.000
4	02	02	2	06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		1	Rp 945.000			1	Rp 1.125.000
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang Difasilitasi		100	Rp 20.399.888.953			100	Rp 25.054.000.000
4	02	02	2	08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		450	Rp 20.310.383.953			400	Rp 25.000.000.000
4	02	02	2	08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12	Rp 48.015.000			12	Rp 18.900.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Tahun 2026	Tahun 2026	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	02	2	08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		12	Rp 41.490.000			12	Rp 35.100.000
4	02	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>		<b>100</b>	<b>Rp 25.418.740.675</b>			<b>100</b>	<b>Rp 29.914.525.718</b>
4	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		100	Rp 15.000.000			100	Rp 247.000.000
4	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	Rp 7.500.000			5	Rp 97.000.000
4	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10	Rp 7.500.000			10	Rp 150.000.000
4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	Rp 4.903.728.110			100	Rp 4.986.658.624
4	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		560	Rp 4.718.858.646			37	Rp 4.686.658.624
4	02	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	Rp 184.869.464			12	Rp 230.000.000
4	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	Rp 50.000.000			100	Rp 50.000.000
4	02	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Rp 50.000.000			1	Rp 50.000.000
4	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	Rp 429.030.000			100	Rp 512.000.000
4	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		55	Rp 1.500.000			148	Rp 137.000.000
4	02	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		55	Rp 427.530.000			37	Rp 375.000.000
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	Rp 962.912.000			100	Rp 1.458.291.000
4	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		60	Rp 152.570.400			12	Rp 410.000.000
4	02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		14	Rp 49.052.800			6	Rp 125.000.000
4	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	Rp 30.672.000			4	Rp 32.000.000
4	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	Rp 16.232.000			2	Rp 125.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Tahun 2026	Tahun 2026	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	Rp 4.000.000			1	Rp 10.000.000
4	02	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	Rp 74.172.000			12	Rp 80.025.000
4	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	Rp 430.152.800			12	Rp 461.266.000
4	02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2	Rp 50.000.000			1	Rp 55.000.000
4	02	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		24	Rp 156.060.000			12	Rp 160.000.000
4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	<b>Rp 230.000.000</b>			100	Rp 1.200.000.000
4	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		8	Rp 45.000.000			3	Rp 750.000.000
4	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	Rp 185.000.000			45	Rp 450.000.000
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi		100	<b>Rp 1.898.480.673</b>			100	Rp 2.121.448.000
4	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36	Rp 41.000.000			12	Rp 75.000.000
4	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	Rp 386.360.000			12	Rp 400.000.000
4	02	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		26	Rp 378.346.000			12	Rp 821.448.000
4	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		10	Rp 1.092.774.673			12	Rp 825.000.000
4	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100	<b>Rp 845.590.800</b>			100	Rp 1.590.000.000
4	02	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3	Rp 124.641.900			4	Rp 175.000.000
4	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		22	Rp 155.719.700			19	Rp 425.000.000
4	02	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		3	Rp 12.500.000			4	Rp 50.000.000
4	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25	Rp 120.538.000			37	Rp 365.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
	Tahun 2026					Tahun 2026	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	Rp 260.014.000			1	Rp 200.000.000
4	02	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		75	Rp 172.177.200			163	Rp 375.000.000
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi		100	<b>Rp 15.855.279.092</b>			100	Rp 17.535.528.094
4	02	01	2	15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		420	Rp 15.390.279.092			420	Rp 17.070.528.094
4	02	01	2	15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		150	Rp 375.000.000			150	Rp 375.000.000
4	02	01	2	15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		30	Rp 90.000.000			30	Rp 90.000.000
4	02	01	2	16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi		100	<b>Rp 228.720.000</b>			100	Rp 213.600.000
4	02	01	2	16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		30	Rp 1.800.000			30	Rp 3.600.000
4	02	01	2	16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		12	Rp 54.920.000			12	Rp 55.000.000
4	02	01	2	16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		12	Rp 172.000.000			12	Rp 155.000.000

## **BAB V**


### **PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2026.

Probolinggo, Desember 2025  
SEKRETARIS DPRD KOTA ROBOLINGGO

  
Dr. TEGUH BAGUS SUJAWANTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.196606051990031015